

**IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**

**(Study di Dinas Pasar Kota Malang)**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DESEMTI WAHYU MERLIAN**

NIM. 105010101111062



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR  
TRADISIONAL  
(Study Di Dinas Pasar Kota Malang)

**Identitas Penulis** :  
**Nama** : Desemti Wahyu Merlian  
**NIM** : 105010101111062  
**Konsentrasi** : Hukum Administrasi Negara  
**Jangka waktu penelitian** : 6 bulan

**Disetujui pada tanggal:**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, S.H. M.H  
NIP. 19590717 198601 1 001

LUTFI EFFENDI, S.H. M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

LUTFI EFFENDI, S.H. M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar  
Tradisional**

**(Study Di Dinas Pasar Kota Malang)**

Desemti Wahyu Merlian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [Semicenti@yahoo.co.id](mailto:Semicenti@yahoo.co.id)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang, dan untuk mengetahui, menemukan, serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Malang Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder di Dinas Pasar Kota Malang dan diambil dari para pedagang pasar di Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Mergan Kota Malang. Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang belum optimal karena terdapat hambatan – hambatan yang ada di lapangan. Hambatan tersebut antara lain karena kurangnya kesadaran diri dari para pedagang pasar tradisional, lokasi pasar tradisional yang kurang strategis, kurangnya anggota dalam menjalankan pemberdayaan pasar tradisional, dan kurangnya pengalokasian dana. Dengan demikian upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang kedepan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang pasar tradisional, memilih lokasi strategis untuk mendirikan pasar tradisional, meminta tambahan personil yang kepada Padan Kepegawaian Daerah, menjadikan anggaran ke Pemerintah Kota agar menjadi skala prioritas.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Pasar Tradisional di Kota Malang.

**Implementation of Article 18 of the Regulation of the Minister of the Interior  
of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2012 on Management and  
Empowerment of Traditional Market**

**(In Office Market Study Malang)**

Revelation Desemti Merlian, Faculty of Law, University of Brawijaya

Email: [Senticenti@yahoo.co.id](mailto:Senticenti@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

This research aims to find out and analyze Article 18 regulation of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 in 2012 About management and empowerment of traditional market in the city of Malang, and to find out, discover, and analyze the obstacles faced by The Market Research done by Malang juridical sociological methods. The Data used are the primary data and secondary data in the Service Market of Malang and taken from market traders in the market Oro-oro Dowo Mergan Market and Malang. On the results of the research have been able to note that the empowerment of traditional market in the city of Malang not optimal because there are barriers% u2013 the barriers that exist in the field. These obstacles, among others because of lack of self awareness of traders in traditional markets, the traditional market of less strategic, kurangnya members in carrying out the empowerment of traditional markets and the lack of expenditure. Thus efforts made The Market town of Malang to the fore in overcoming these obstacles is to give socialization to traditionalmarket traders, choose a convenient location to erect the traditional market, ask for additional personnel to the Padan Area Staffing, bringing the budget to the City Government to become the priority scale.

Keywords : Implementation, Empowerment, Traditional Market in Malang

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dimana tidak sedikit masyarakatnya memiliki status sosial menengah kebawah, artinya selain masyarakat yang kaya terdapat juga masyarakat yang kurang mampu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat tersebut dapat berbelanja di pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah dimana terdapat dua macam pasar, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Dalam hal ini masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah cenderung memilih pasar tradisional sebagai tempat untuk membeli keperluan sehari-hari, karena pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar menawar harga dimana harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern.

Kondisi seperti ini seolah-olah mengharuskan masyarakat terutama masyarakat yang berstatus sosial menengah kebawah untuk memilih berbelanja di pasar tradisional dibandingkan berbelanja di sebuah supermarket atau semacamnya dengan harga yang sedikit lebih mahal. Dimana semua kebutuhan mulai dari sandang, pangan hingga produk elektronik tersedia di pasar tradisional, selain produk yang dijual sangat lengkap harga produk-produk tersebut pun cenderung lebih murah dengan kualitas yang cukup bagus.

Kota Malang tahun 2013 ini Dinas Pasar Kota Malang telah mengelola pasar tradisional sebanyak 28 pasar yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Semua pasar-pasar tradisional tersebut mendapat perhatian khusus dari Dinas Pasar terutama dalam pemberdayaan pasar tradisional.

Sehingga untuk menjadikan pasar tradisional menjadi lebih baik dan berkembang sebagaimana mestinya pemerintah mengatur beberapa hal penting tersebut diatas melalui Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, yaitu:

- (1) Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.*
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:*
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;*
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan*
  - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.*

Dalam Pasal 18 yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwasannya Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional khususnya yang ada di Kota Malang. Dalam hal ini yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan pasar tradisional adalah Dinas Pasar Kota Malang.

Untuk pencapaian pemberdayaan pasar tradisional yang lebih baik Pemerintah cenderung mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kurangnya atau terhambatnya perkembangan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang. Sehingga pemerintah diwajibkan cepat dan tanggap dalam menanggulangi kendala-kendala pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pasar mengenai pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang dapat dilihat dari beberapa contoh pasar yang akan diambil oleh penulis sebagai perbandingan, yaitu pasar Oro-oro Dowo dan pasar Mergan yang masing-masing pasar tersebut di bawah pengawasan Dinas Pasar Kota Malang.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka penulis mencari referensi dari penelitian terdahulu dan ditemukan beberapa penelitian mengenai pemberdayaan pasar tradisional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Dinas Pasar Kota Malang ?
2. Apa kendala Dinas Pasar dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional dan bagaimana upaya Dinas Pasar dalam menanggulangi kendala pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang ?

## **C. Metode**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Dinas Pasar Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pasar Kota Malang. Peneliti memilih Dinas Pasar Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur dan menurut hasil pra survey yang dilakukan di Dinas Pasar Kota Malang menyatakan banyak pasar tradisional sejumlah 28 pasar tradisional yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang. Dan dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Dinas Pasar melaksanakan tugas pokok penyusunan dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus di olah, dianalisis oleh peneliti. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari fakta yang ada di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut



dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **a. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang**

Dinas Pasar merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pengelolaan Pasar daerah dan penataan PKL. Dinas Pasar Kota Malang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan dalam negeri. Dinas Pasar Kota Malang bertugas untuk mengelola pasar-pasar di wilayah Kota Malang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pasar, dan sisi kebijakan teknis, dan pelayanan umum serta pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota di Bidang Pasar, untuk menciptakan pasar yang memadai, bersih, dan tertib dan aman.

Berdasarkan keputusan Walikotamadya daerah tingkat II Malang Nomor 45 Tahun 1973 tanggal 31 Maret 1973 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1979, Pasar sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kotamadya Daerahs Tingkat II Malang. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1987 maka pengelolaan pasar dari UPTD Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menjadi Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tuga Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang, sedangkan dalam pemberian kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pamerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah

ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar.

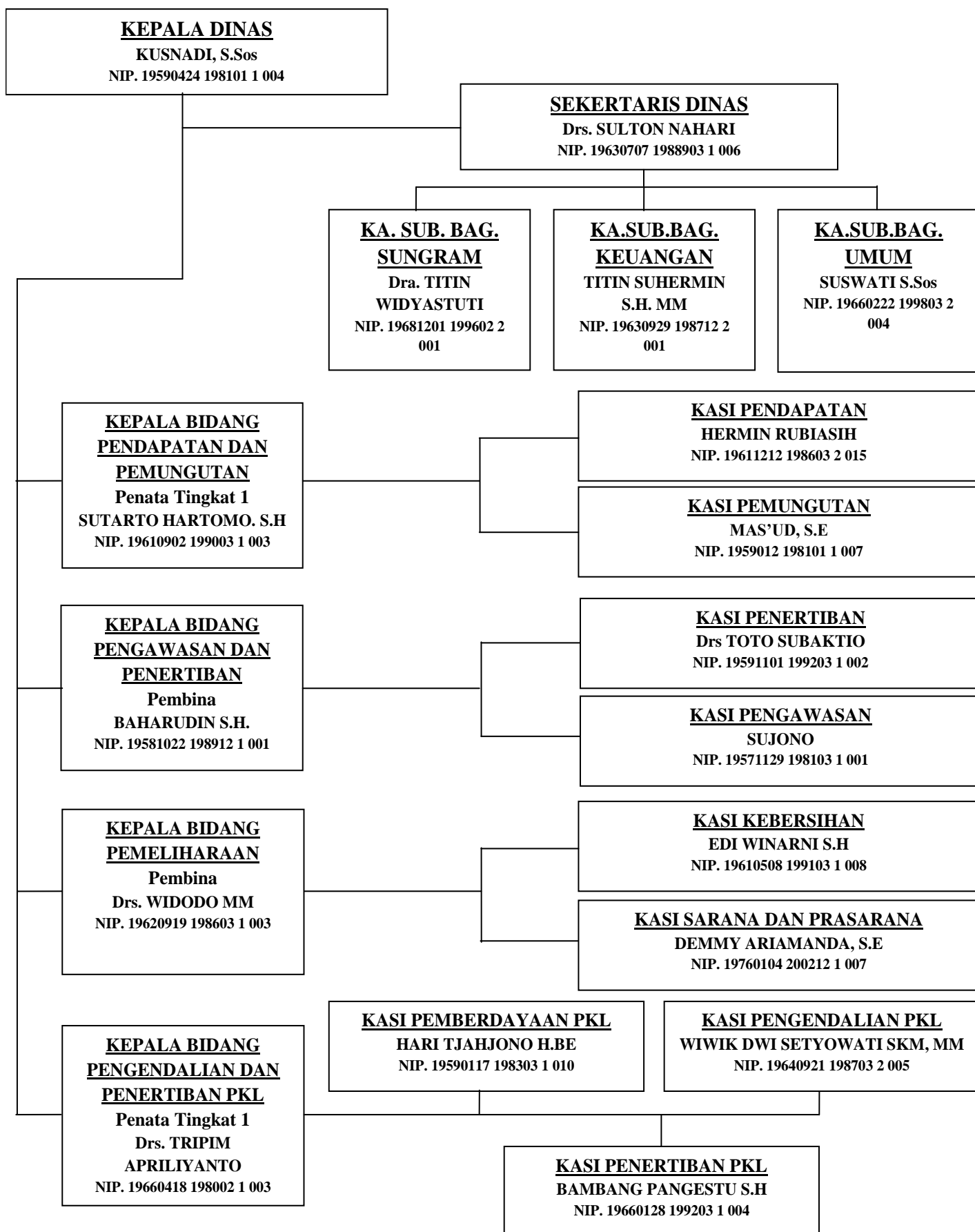
b. Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Dinas Pasar Kota Malang

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar, dengan sasaran meningkatnya kontribusi pasar;
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pasar sesuai kebutuhan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan pertumbuhan usaha perdagangan;
- 3) Mewujudkan kawasan tertib, dengan sasaran terwujudnya penataan, pembinaan PKL, pemberdayaan dan pengawasan PKL; dan
- 4) Mewujudkan SDM aparatur yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

c. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR KOTA MALANG



## **2. Implementasi Pasal 18 Perauran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Dinas Pasar Kota Malang**

Proses dalam pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang dilihat dari dua segi, ialah dari pedagang dan dari sarana prasarana, yaitu:

- a. Pedagang membentuk paguyuban yang terdiri dari komunitas pedagang guna untuk mengurus dan melindungi pedagang di pasar tersebut. Paguyuban didirikan melalui kesadaran para pedagang dan kemudian dibina oleh Dinas Pasar Kota Malang. Tetapi untuk pasar oro-oro dowo dan pasar mergan belum ada paguyuban tersebut.
- b. Selanjutnya proses pemberdayaan sarana prasarana ialah dengan memperbaiki infrastruktur seperti:
  - 1) Bangunan toko/ kios/ los dibuat dengan ukuran standart ruang tertentu;
  - 2) Petak atau blok dengan akses jalan penguujung ke segala arah;
  - 3) Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
  - 4) Penataan toko/ kios/ los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
  - 5) Bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Untuk ketersediaan sarana prasarana pasar sebagai tempat berdagang di Kota Malang telah tersebar di 5 (lima) Kecamatan dengan berbagai klasifikasi kelas Pasar. Perbandingan jumlah pasar yang tersebar di wilayah Kecamatan dan Kelurahan beserta luas dan tahun pembangunannya, adalah sebagai berikut:

**TABEL****Penyebaran Pasar dan Tahun Pembangunannya**

<b>No</b>	<b>Kec</b>	<b>Kel</b>	<b>Nama Pasar</b>	<b>Luas Lahan</b>	<b>Tahun Pembangunan</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Klojen	Sukoharjo	Ps. Besar	21.820 m <sup>2</sup>	Thn 1989	BAIK
		Sukoharjo	Ps. Baru Barat	3.777 m <sup>2</sup>	Thn 1976 & 2002	BAIK
		Klojen	Ps. Klojen	1.860 m <sup>2</sup>	Thn 1976	BAIK
		Kasin	Ps. Kasin	2.616 m <sup>2</sup>	Thn 1976	BAIK
		Oro-oro Dowo	Ps. Oro-oro Dowo	1.920 m <sup>2</sup>	Thn 1976	BAIK
		Bareng	Ps. Bareng	1.407 m <sup>2</sup>	Thn 1978	BAIK
		Gading Kasri	Ps. Buku Wilis	800 m <sup>2</sup>	Thn 2002	BAIK
		Bareng	Ps. Mergan	1.800 m <sup>2</sup>	Thn 1979	BAIK
		Kauman	Ps. Bunga	2.900m <sup>2</sup>	Thn 1978	BAIK
		Kauman	Ps. Burung	655 m <sup>2</sup>	Thn 1973	BAIK
		Sukoharjo	Ps. Baru Timur	4.842 m <sup>2</sup>	Thn 1977	BAIK
		Kidul Dalem	Ps. Embong Brantas	1.800m <sup>2</sup>	Thn 1976	
		Kasin	Ps. Nusakambangan	800m <sup>2</sup>	Thn 1978	BAIK
		Kauman	Ps. Talun	1.916m <sup>2</sup>	Thn 1976	BAIK

No	Kec	Kel	Nama Pasar	Luas Lahan	Tahun Pembangunan	Ket
2	Lowokwaru	Lowokwaru	Ps. Tawangmangu	16.955 m <sup>2</sup>	Thn 1979 & 1993	BAIK
		Dinoyo	Pasar Dinoyo	9.980 m <sup>2</sup>	Thn 1976	BAIK
3	Blimbing	Blimbing	Ps. Blimbing	11.320 m <sup>2</sup>	Thn 1978	BAIK
		Bunul Rejo	Ps. Bunul	4.904 m <sup>2</sup>	Thn 1982	BAIK
4	Sukun	Sukun	Ps. Sukun	3.170 m <sup>2</sup>	Thn 1987	BAIK
		Gadang	Ps. Gadang	1,962 m <sup>2</sup>	Thn 1974	BAIK
		Sukun	Ps. Hewan Sukun			BAIK
5	Kedung Kandang	Madyopuro	Ps. Madyopuro	1.624 m <sup>2</sup>	Thn 1974 & 1995	BAIK
		Sawojajar	Ps. Sawojajar	2.496m <sup>2</sup>		BAIK
		Kota Lama	Ps. Kota Lama	1.250 m <sup>2</sup>	Thn 1976	BAIK
		Lesanpuro	Ps. Lesanpuro	502 m <sup>2</sup>	Thn 2002	BAIK
		Gadang	Ps. Induk Gadang	15.590 m <sup>2</sup>	Thn 1989	BAIK
		Kota Lama	Ps. Kebalen	1.313 m <sup>2</sup>	Thn 1979	BAIK
		Kedung Kandang	Ps. Kedung Kandang	7.444 m <sup>2</sup>	Thn 1994	BAIK
		Cemoro Kandang	Ps. Temboro	15x30m <sup>2</sup>	Thn 1997	BAIK
		Sawojajar	Ps. Velodrom		Thn 2011	BAIK

No	Kec	Kel	Nama Pasar	Luas Lahan	Tahun Pembangunan	Ket
		Lesanpuro	Ps. Lesanpuro	502 m <sup>2</sup>	Thn 2002	BAIK
		Gadang	Ps. Induk Gadang	15.590 m <sup>2</sup>	Thn 1989	BAIK
		Kota Lama	Ps. Kebalen	1.313 m <sup>2</sup>	Thn 1979	BAIK
		Kedung Kandang	Ps. Kedung Kandang	7.444 m <sup>2</sup>	Thn 1994	BAIK
		Cemoro Kandang	Ps. Temboro	15x30m <sup>2</sup>	Thn 1997	BAIK
		Sawojajar	Ps. Velodrom		Thn 2011	BAIK

Sumber data sekunder diolah 2013

Dari 30 pasar tradisional yang berada di Kota Malang, penulis mengambil 2 sampel pasar untuk perbandingan dari pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pasar, yaitu pasar tengah kota pasar oro-oro dowo dengan pasar pinggiran kota pasar mergan. Untuk mempermudah dalam membandingkan kedua sampel tersebut penulis menggunakan teknik wawancara, terhadap dua pedagang pasar oro-oro dowo dan dua pedagang pasar mergan, berikut adalah hasil wawancara:

1. Pasar Oro-oro dowo Kota Malang:

- a) Pedagang pasar oro-oro dowo yang sudah berjualan sejak tahun 1984 dengan menjual buah-buahan, pakan burung, dan baju bernama Ibu Heni (53) mengatakan bahwa keadaan di pasar oro-oro dowo sangat nyaman, aman, dan nyantai. Tidak ada pembinaan disiplin bagi para pedagang karena pedagang sendiri juga merasa sudah perjualan dengan baik tanpa ada pembinaan. Kalau kondisi pasar sangat bersih serta bangunan bedak-

bedak yang berada didalamnya tertata dengan rapi. Toilet yang sudah disediakan Dinas Pasar pun terjaga sehingga air yang mengalir bersih, hanya saja mengalirnya hanya sedikit jadi bagi para pedagang di pasar oro-oro dowo airnya kurang. Untuk penanganan sampah juga sudah baik, terdapat TPS yang sampahnya akan diambil oleh petugas kebersihan dari Dinas Pasar setiap hari. Para pedagang yang berjualan pun saling menjaga satu sama lain.<sup>1</sup>

- b) Selanjutnya pedagang kue dan kersek plastik, bernama Bapak Saiful Anwar (40) yang telah berjualan sejak tahun 2009 juga mengatakan hal yang sama, bahwasannya pasar oro-oro dowo telah meraih penghargaan sebagai pasar tradisional terbersih tingkat Nasional tahun 2010. Dengan kebersihan yang terjaga maka para pedagang juga akan nyaman selama berjualan di pasar oro-oro dowo, tidak hanya pedagang yang merasa nyaman, para pembeli pun juga merasa nyaman karena saat ini sebagian besar pembeli adalah dari kalangan menengah keatas. Untuk keluhan yang dialami ialah air yang kurang banyak mengalir dan ketika hujan turun terjadi kebocoran di beberapa titik.<sup>2</sup>

## 2. Pasar Mergan Kota Malang:

- a) Pedagang pasar mergan bernama Ibu Mujinem (50) berjualan sayur dan buah mengatakan bahwa belum ada pembinaan disiplin bagi para pedagang maupun pembinaan untuk menarik pembeli, hanya saja sesekali mantri atau petugas pasar mergan berkeliling untuk menanyakan mengenai penjualan barang yang dijual oleh para pedagang, itupun sesekali saja. Untuk kenyamanan dirasa kurang nyaman karena kondisi lantai pasar yang kotor bahkan becek ketika hujan turun. Selain becek ketika hujan turun, dari atap-atap pasar juga sering bocor. Untuk sistem air sudah bersih namun toilet di pasar mergan bukan dari Dinas Pasar, melainkan swadaya masyarakat yang memungut iuran kepada masyarakat sekitar untuk dibangun toilet dan mushola. Dalam penanganan sampah, pasar

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan pedagang pasar oro-oro dowo Kota Malang, pada tgl 28 November 2012, pukul 08.45 WIB.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan pedagang pasar oro-oro dowo Kota Malang, pada tgl 28 November 2012, pukul 08.55 WIB.



mergan sudah memiliki TPS dan sampah-sampah dari pasar tersebut diambil setiap hari oleh petugas kebersihan sari Dinas Pasar. Pasar mergan merupakan pasar yang buka dari pukul 02.00 dini hari sampai 10.00 pagi. Oleh karena itu penerangan sangat dibutuhkan ketika malam sampai pagi, tetapi mengenai sistem elektrikal tersebut dirasa tidak ada masalah.<sup>3</sup>

- b) Ibu Sutaji (63) berjualan perancangan sejak tahun 1982 juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda mengenai pasar mergan, yaitu dimana dua toilet yang berada di pasar mergan kurang layak seperti terlihat kumuh. Untuk bangunan bedak, sebagian pedagang sedang menunggu janji dari pemerintah untuk merenovasi bangunan karena selama 2 tahun ini hanya sebagian bangunan bedak saja yang sudah direnovasi. Pegadang merasa ketika musim hujan sering kali terjadi bocor yang membuat becek di dalam pasar, sehingga mengganggu kenyamanan pedagang dan kenyamanan pada pembeli tentunya.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibandingkan bahwa pemberdayaan pasar oro-oro dowo sudah dilaksanakan dengan sangat baik dibandingkan dengan pasar mergan. Dibuktikan pasar oro-oro dowo telah meraih penghargaan sebagai pasar tradisional terbersih tingkat Nasional tahun 2010, tetapi juga terdapat kekurangan dalam pemberdayaan pasar oro-oro dowo, salah satunya ialah belum adanya pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagang pasar seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Untuk Pasal 18 ayat (2) huruf (a), dan (c) telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pasar Kota Malang.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan pedagang pasar mergan Kota Malang , pada tgl 28 November 2013, pukul 09.20 WIB.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan pedagang pasar mergan Kota Malang, pada tgl 28 November 2013, pukul 09.35 WIB.

### **3. Kendala Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Dinas Pasar Kota Malang**

Untuk pencapaian tujuan yang dimaksud yaitu menjadikan pasar tradisional menjadi lebih baik dengan jalan melalui pemberdayaan pasar tradisional, pemerintah cenderung mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional tersebut. Adapun uraiannya sebagai berikut:

#### **a. Faktor Eksternal:**

##### **1) Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional**

Fakta di lapangan membuktikan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang adalah kurangnya kesadaran pedagang liar di pasar tradisional. pedagang tersebut tidak memiliki kios atau bedak untuk menggelar barang dagangannya, sehingga ia berjualan di pinggiran pasar tradisional dan sangat mengganggu bahkan merusak keindahan lingkungan sekitar pasar. Mereka para pedagang tersebut tidak mau dipindahkan ke tempat pasar tradisional lain dengan alasan keuntungan mereka lebih besar berjualan dipinggiran pasar daripada harus berjualan di dalam pasar dengan bedak yang sudah disediakan dan tempat atau lokasi pasar yang lebih jauh, karena apabila menempati tempat baru mereka harus dapat beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar.<sup>5</sup>

##### **2) Lokasi Pasar Tradisional**

Lokasi juga sangat menentukan pendapatan para pedagang, apabila lokasi pasar strategis maka para pedagang bisa mendapatkan untung lebih banyak, sedangkan apabila pasar tersebut tidak strategis maka yang terjadi adalah sebaliknya, pedagang tidak akan mendapat untung banyak karena pembeli yang kurang.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Penertiban PKL, pada tgl 12 November 2013, pukul 09.20 WIB.

Masalah lokasi tersebut juga harus mendapat perhatian khusus dari Dinas Pasar karena sangat mempunyai pengaruh penting dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang.<sup>6</sup>

b. Faktor Internal:

1) Personil atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasar tradisional di Kota Malang berjumlah 30 pasar, dengan jumlah pasar yang sebanyak itu pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berwewenang dalam jabatannya juga lebih banyak. Karena pada faktanya dilapangan Dinas Pasar Kota Malang sangat memerlukan tambahan personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat lebih efektif dan terarah seperti dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Dinas Pasar mengalami kekurangan personil, khususnya di bagian pengendalian dan penertiban PKL. Dengan jumlah personil yang minim mereka cenderung kuwalahan dalam mengendalikan 30 pasar tradisional di Kota Malang.<sup>7</sup>

2) Faktor Pengalokasian Anggaran Dana

Untuk melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional yang paling utama dibutuhkan adalah anggaran atau biaya dalam memberdayakan pasar tradisional di Kota Malang. Untuk itu apabila biaya yang dibutuhkan tidak mencapai skala prioritas maka yang terjadi adalah ketidak sempurnaan tujuan yang akan dicapai. Pemberdaan pasar tradisional tidak dapat terlaksana seperti dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Op.cit* Hasil wawancara dengan Kasi Penertiban PKL.

Sedangkan pada faktanya Dinas Pasar seringkali mendapat kendala dari segi pengalokasian dana yang kurang dari pemerintah. Dana yang turun tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Dinas Pasar, sehingga mengganggu kinerja Dinas Pasar dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang.

#### **4. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Kota Malang di Dinas Pasar**

Untuk menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala tersebut Dinas Pasar mengupayakan beberapa hal, upaya tersebut guna menjaga pemberdayaan pasar tradisional agar tetap dapat terlaksana dengan baik, ialah:

##### **a. Upaya Faktor Eksternal:**

##### **1) Upaya Mengatasi Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional**

Dinas Pasar bekerjasama dengan Kepala Pasar mergan maupun pasar oro-oro dowo untuk melakukan pendekatan secara persuasif atau pendekatan secara intern antara kedua belah pihak untuk melakukan diskusi guna mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila para pedagang tetap tidak mau pindah maka Dinas Pasar akan memberikan peringatan berupa teguran sebanyak 3 kali, untuk selanjutnya bilamana para pedagang tetap tidak mau pindah maka pedagang yang menyalahi aturan tersebut akan di eksekusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehingga dengan cara seperti itu diharapkan para pedagang tidak lagi berjualan di pinggiran pasar, karena keberadaan para pedagang liar tersebut sangat menggagu pemandangan dan bahkan mengakibatkan kemacetan di sekitar pasar.<sup>9</sup>

##### **2) Upaya Mengatasi Lokasi Pasar Tradisional**

Pemilihan suatu lokasi yang akan dibangun suatu pasar harus ditempat yang strategis, aman, dan nyaman. Strategis dalam hal ini ialah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

lokasi tersebut mudah dijangkau dan terdapat transportasi umum serta tersedianya tempat parkir yang aman. Dinas Pasar mengupayakan agar pemberdayaan pasar dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala.<sup>10</sup>

b. Upaya Faktor Internal:

1) Upaya Mengatasi Keterbatasan Personil atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mengatasi kendala dari segi kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) atau personil di Dinas Pasar Kota Malang, Dinas Pasar mengupayakan untuk meminta tambahan personil kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan atau kekurangannya pegawai di Dinas Pasar khususnya di bidang pengendalian dan penertiban PKL agar kinerja yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.<sup>11</sup>

2) Upaya Mengatasi Pengalokasian Anggaran Dana

Dana atau biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional sangatlah banyak, dan tidak menelan biaya yang sedikit. Sehingga untuk pencapaian kinerja Dinas Pasar dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional faktor utama yang harus terpenuhi adalah dana yang cukup banyak.

Agar anggaran dana tersebut dapat diperoleh dengan maksimal maka Dinas Pasar mengajukan anggaran ke Pemerintah Kota agar dana yang teralokasi menjadi skala prioritas dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin.<sup>12</sup>

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Op.cit* Hasil wawancara dengan Kasi Penertiban PKL.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku, tetapi pelaksanaan pemberdayaan tersebut kurang efisien karena terdapat beberapa kendala.

- b. Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang telah mengalami beberapa kendala seperti faktor kesadaran para pedagang, faktor lokasi pasar, faktor keterbatasan personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pasar Kota Malang, dan faktor pengalokasian dana untuk melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional yang kurang.
- c. Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang mengalami beberapa kendala dan Dinas Pasar telah mengupayakan beberapa harapan agar pemberdayaan pasar tradisional dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan peraturan dan kebijakan, diantaranya ialah Dinas Pasar mengupayakan melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang yang tidak patut terhadap peraturan, mencari lokasi yang strategis untuk membangun pasar tradisional, Dinas Pasar mengupayakan untuk meminta tambahan personil ke Badan Kepegawaian Daerah, dan mengajukan anggaran dana yang teralokasi menjadi skala prioritas.

## **2. Saran**

Saran dari peneliti kepada Dinas Pasar Kota Malang dan para pedagang pasar tradisional yakni:

- a. Melihat kurangnya sosialisasi atau pembinaan peningkatan kompetensi pedagang pasar seperti yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. dan Dinas Pasar diharapkan dapat memberikan respon yang baik terhadap

keluhan dari para pedagang pasar mengenai bangunan pasar yang seringkali bocor dan becek ketika hujan turun.

- b. Serta para pedagang juga diharapkan dapat saling bekerjasama menjaga kelangsungan pasar tradisional di Kota Malang agar dapat menjadikan pasar tradisional dapat berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern seperti halnya tujuan dari diadakannya pemberdayaan pasar tradisional.